

CITA-CITA SOSIAL MUHAMMADIYAH

Dr. H.M. Amien Rais



Ketika KHA Dahlan mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah sekitar tiga perempat abad yang lalu, masyarakat Indonesia masih berada di bawah penjajahan Belanda. Sedangkan umat Islam, sebagai mayoritas bangsa Indonesia, masih tenggelam dalam rawa-rawa keterbelakangan dan praktek keagamaan yang dibumbui dengan takhayul, bid'ah dan khurafat.

Secara garis besar ada dua hal yang ingin dikerjakan oleh Ahmad Dahlan secara serempak, yaitu pertama, melepaskan umat Islam dari kungkungan takhayul, bid'ah dan khurafat yang membelenggu umat dari pemahaman tauhid yang benar, dan kedua memajukan pendidikan umat Islam dengan memberikan angkatan mudanya ilmu-ilmu "Barat" dalam rangka merebut kebahagiaan keduniaan yang juga harus dikejar oleh umat Islam.

Gerakan kembali ke Kitabullah dan Sunnah Rasul saw dikumandangkan oleh Ahmad Dahlan sambil menyadarkan umat bahwa perbuatan syirik merupakan penyakit terberat, sedang obat yang sejati adalah tauhid yang benar. Kata-kata yang juga disitir oleh almarhum K.H. Hadjid, salah satu murid Ahmad Dahlan mengenai hal ini adalah :

*Al-daa'u musyaarakatullahi fi jabarutih
Wa al-dawaau tauhidullahi haqqan*

Nampaknya disadari benar oleh pendiri Muhammadiyah bahwa tauhid yang benar dapat memperbaiki seluruh dimensi kehidupan manusia sehingga dapat melepaskan manusia dari setiap belenggu (aghlaal) yang bersifat

sosial, budaya, politik, ekonomi, dan lain sebagainya.

Pada waktu itu Kyai Ahmad Dahlan tidak mengenal teori-teori ilmu sosial tentang sebab-musabab kemiskinan dan di kalangan umat agaknya belum dikenal istilah-istilah seperti teori klas, pendekatan fungsional, pendekatan struktural, kemiskinan struktural dan lain sebagainya.

Namun di samping Kyai Dahlan meluruskan arah Kiblat, mengajak shalat hari raya ke tanah lapang, memberantas berbagai manifestasi penyakit TBC (takhayul, bid'ah dan khurafat), dan memajukan pendidikan umum serta kepanduan Hizbul Wathan, beliau menggariskan sebuah cita-cita sosial yang sangat jelas.

Hal ini dapat disimpulkan dari kenyataan bahwa Kyai mengajarkan dalam setiap forum pengajiannya surat al-Ma'un sampai para pendengarnya merasa bosan. Akan tetapi Kyai sendiri tidak pernah bosan sampai surat al-Ma'un itu mulai dipraktekkan dalam kenyataan oleh para anggota dan simpatisan Muhammadiyah.

Kyai tidak saja berteori dan sekedar menganjurkan, akan tetapi juga bersedia berkorban untuk mempraktekkan cita-cita sosialnya, yakni terutama tercapainya suatu masyarakat egaliter yang menyantuni anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Suatu pagi buta Kyai memukul kenthongan untuk mengumpulkan para tetangganya agar mau membeli peralatan rumah, tangganya sebagainya dalam sebuah lelangan spontan. Kyai menjelaskan bahwa perolehan dari lelangan tersebut akan digunakan untuk "modal" perjuangan, termasuk menyantuni fuqara, masakin dan aitam.

Bila ditilik agak mendalam dalam surat al-Ma'un itu terdapat beberapa pesan penting, antara lain; pertama, orang yang mentelantarkan kaum dhu'afa tergolong di dalam mereka yang

mendustakan agama; ke dua, ibadah shalat memiliki dimensi sosial yang kelewat jelas, dalam arti tidak ada faedah shalat bila tidak dikerjakan dimensinya; ke tiga, melakukan amal shalih tidak boleh dibarengi dengan riya'; dan ke empat, termasuk mendustakan agama adalah mereka orang lain, yang bersikap egois dan egosentris.

Bila didapatkan dalam 4 buah istilah cita-cita sosial Muhammadiyah berkisar pada *ukhuwwah hurriyyah, musawah dan 'adaalah* (persaudaraan kemerdekaan, persaan dan keadilan).

Seperti kata Rasul saw, tidak sempurna iman seseorang sampai ia mencintai dirinya sendiri (*ukhuwwah*). Di dunia ini setiap manusia bebas merdeka untuk memilih jalan hidupnya, namun ia akan bertanggung jawab sepenuhnya diharapkan Allah (*hurriyyah*). Sedangkan *musawah* berarti bahwa manusia punya kesamaan derajat dengan manusia lain sehingga tidak boleh ada eksploitasi manusia atas manusia, karena memang tidak ada hubungan antar manusia yang berdasarkan inferioritas dan superioritas tertentu.

Sementara itu keadilan dalam arti luas menjadi fondasi paling dalam untuk tegaknya persaudaraan, kemerdekaan, dan persamaan di atas. Demikian mendasarnya masalah keadilan ini dalam Islam sebagai *religion of justice*. Keadilan seperti disebutkan al-Quran dibarengi dengan *al-ihsan* dan keadilan dalam konteks al-Qur'an bersifat komprehensif, bukan sektoral. Artinya keadilan itu meliputi kehidupan hukum, sosial, politik, ekonomi dan lain sebagainya.

Namun, dalam praktek, Persyarikatan Muhammadiyah sampai sekarang baru memperhatikan beberapa sektor kehidupan saja dalam rangka mencapai cita-cita sosial Islaminya. Sebagai misal, PKU (Penolong Kesusaharaan Umum) dan PAYM (Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah) adalah manifestasi *concern* persyarikatan untuk memwujudkan sebagai cita-cita sosialnya. Idem ditto mengenai amal-usaha persyarikatan di bidang pendidikan. Sudah tentu cara-cara mencapai cita-cita sosial yang demikian luas dan besar seperti dilakukan oleh Muhammadiyah dewasa ini

semakin tidak memadai, bila tidak dapat dikatakan sudah makin kehilangan relevansi dan *out-of-touch* dari kenyataan-kenyataan sosial di tanah air kita.

Realitas Keras

Tiga perempat abad yang lalu, keberadaan persyarikatan di tengah masyarakat Indonesia yang masih sepenuhnya agraris dan serba sederhana nampak begitu relevan dan bahkan berada di depan sejarah. Akan tetapi masyarakat terus bergerak maju dan dewasa ini proses industrialisasi sudah mulai kita masuki dengan segala implikasinya, namun Muhammadiyah sedikit banyak terasa seperti berjalan di tempat. Dengan kata lain, perubahan sosial dan budaya yang terus berlangsung sekarang ini agaknya kurang diantisipasi oleh persyarikatan. Konsep-konsep perjuangan, pranata-pranata organisasional dan corak *leadership* yang ada dapat diibaratkan berada di belakang perubahan sosial dan bukan berada di depan, seperti puluhan tahun yang lalu.

Sebagai misal, dengan jumlah penduduk Indonesia yang kini berkisar 185 juta orang, kita menghadapi dua persoalan kembar yang berskala raksasa, yang menyebabkan Muhammadiyah nampak terlalu kecil untuk menghadapi dua masalah tersebut. Persoalan itu adalah kemiskinan dan pengangguran. Pembangunan kita memang relatif berhasil bila kita bandingkan antara pendapatan perkapita Indonesia di tahun 1966 yang cuma 120 dollar Amerika, dan di tahun 1990 sudah mencapai 560 dolar. Akan tetapi angka pengangguran dari tahun ke tahun cenderung terus membesar. Maka pada tahun 2000 nanti angkatan kerja Indonesia (sebagian besar terdiri dari usia muda) akan mencapai angka 105 juta, yang berarti kenaikan sebesar 26 juta dihitung dari jumlah angkatan kerja pada 1990 yang berjumlah 79 juta. Dalam pada itu pengangguran terselubung (*disguised unemployment*) selalu merupakan masalah besar di bidang tenaga-kerjaan. Menurut BPS dan Bappenas pengangguran terselubung pada Pelita IV yang lalu berjumlah 9,16 juta orang sedangkan yang benar-benar *jobless* hanyalah 400 ribu orang.

Namun menurut Prof. Sumitro pada 1987 (akhir Pelita IV), jumlah penganggur terselubung mencapai lebih dari 40% dari seluruh angkatan kerja yang jumlahnya 72 juta orang lebih, jadi sekitar 30 juta orang adalah penganggur terselubung. Angka-angka seperti ini memang membuat kecut hati kita dan sampai sekarang belum terlihat cara-cara yang meyakinkan untuk mengatasi pengangguran massif itu.

Para ekonom berpendapat bahwa sektor industri bukan merupakan andalan yang mampu menyerap tenaga kerja besar-besaran. Baik sektor industri kecil, sektor aneka industri dan sektor industri pada umumnya, diperkirakan hanya akan dapat menyedop sekitar 12% angkatan kerja. Lantas bagaimana nasib yang 88%, sementara sektor pertanian mungkin juga tidak memiliki lagi daya absorpsi yang tinggi ?.

Disamping pengangguran kita juga menyaksikan adanya *increasing poverty* atau kemiskinan yang makin meluas. Para ahli memperkirakan bahwa masih ada sekitar 25% rakyat kita yang hidup dibawah garis kemiskinan. Upah minimum yang menjadi standar di Indonesia barangkali termasuk yang paling rendah di muka bumi.

Sebagai misal, upah minimum yang ditetapkan Depnaker untuk Jawa Tengah adalah Rp. 1.630,- perhari/orang yang berarti sekitar 84 sen Amerika kurang dari satu dolar. Pada hal di Jawa Tengah ada sekitar 50 perusahaan, termasuk PTP (PT Perkebunan) milik pemerintah di Semarang, Solo, Pekalongan dan Tegal, yang hanya mampu menggaji tenaga kerjanya sebesar antara Rp. 700,- sampai Rp. 1.200,- per hari/orang.

Ini berarti ada selisih antara upah riil dengan upah minimum sebesar 30% sampai 60%. Bila upah yang riil itu menjadi nilai nominal sedangkan harga-harga barang menjadi nilai riil, maka dapat dibayangkan bahwa tenaga kerja Indonesia adalah manusia-manusia yang *under-nourished*, *underpaid* dan karena itu sangat *under developed*.

Agaknya tidak gampang untuk mendapat angka yang persis tentang distribusi pendapatan nasional, sehingga kita sulit memperoleh gambaran luasnya kemelatan dikalangan masya-

rakat Indonesia. Namun kesenjangan kaya-miskin di Indonesia barangkali dapat digambarkan lewat kurve dibawah ini :

Sedangkan distribusi pendapatan nasional yang lebih adil, kira-kira dapat digambarkan dengan kurve di bawah ini :

Melihat beratnya permasalahan pengangguran dan kemelatan yang kita hadapi, kita pasti sadar bahwa untuk mencapai cita-cita sosial yang Islami sehingga terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, banyak sekali usaha-usaha yang harus dilakukan. Apalagi fenomena konglomerasi yang demikian mencolok, berjalanya semacam *law of capitalist accumulation* seakan-akan tidak dapat dihindarkan lagi. Hukum akumulasi kapitalis itu sudah berjalan agak lama dimasyarakat kita, dimana pengusaha dengan modal kakap cenderung merubuh pengusaha dengan modal teri pada bidang usaha yang sama.

Pada pokoknya ada tiga cara yang dapat ditempuh untuk mencapai *al-'adaalah al-ijtimaiyyah* atau keadilan sosial dalam masyarakat kita. Pertama, cara revolusioner; cara ini menghendaki perubahan struktural yang radikal sehingga dapat dijamin pembagian pendapatan nasional yang lebih kurang merata. Namun kini terbukti hampir semua masyarakat yang menerapkan revolusi sosial untuk mengganti masyarakat yang feodalis atau kapitalis berakhir dengan kegagalan. Teori sosialisme adalah bagus, tetapi praktik sosialisme menunjukkan rangkaian kegagalan, disamping selalu muncul *kelas baru* yang berwatak eksploitatif secara ekonomi, sosial dan politik.

Kedua, cara perbaikan inkremental; cara ini menuntut kesadaran kaum *the haves* untuk meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan sosial mereka agar mereka mau mengeluarkan sebagian kekayaan mereka untuk memperciut kesenjangan sosial-ekonomi yang ada dalam masyarakat. Sesungguhnya kewajiban zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, hibah, hadiah dan lain sebagainya seperti dituntunkan Islam dapat dikatakan jatuh dalam katagori ini.

Ketiga, cara reformatif. Cara ini berupa perubahan-perubahan yang cukup dratis, namun tanpa mengukir-balikkan struktur ekonomi dan politik. Perubahan reformatif adalah

perubahan yang disertai *political will* yang kuat lewat perundang-undangan dengan *law enforcement* yang ketat, misalnya dengan memberlakukan undang-undang anti-monopoli dan monopsoni, undang-undang yang membela hak-hak konsumen, dan segala hal yang dapat mengurangi jarak sosial-ekonomi antara lapisan kaya dan lapisan miskin.

Sementara itu sering dilontarkan pendapat bahwa anjuran infaq dan sebagnsanya diajarkan Islam dianggap sebagai anjuran *charity*, karitas atau kedermawanan yang tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Pendapat seperti ini nampak bagus secara sekelebatan, tetapi sesungguhnya sangat naif karena melupakan bahwa bila kaum berpunya melaksanakan ajaran Islam, pasti akan terjadi proses *leveling-of* di dalam masyarakat. Mereka yang "sinis" pada *charity* cenderung mengingkari pemecahan revolusioner. Mereka tidak mampu menjawab *what's next?* sesudah menjebol struktur yang ada.

Lantas bagaimana dengan posisi persyarikatan dalam menghadapi persoalan-persoalan sosial-ekonomi yang tidak gampang tersebut? Saya kira seyogianya Muhammadiyah tidak "bernafsu besar tetapi tenaga kurang" seperti kata sebuah ungkapan. Masalah yang kita hadapi jauh lebih besar dibandingkan dengan kemampuan kita yang ada baik *qua* konsep, organisasi, kekuatan personil, daya dukung

finansial dan lain sebagainya. Jadi kita harus bersikap realitis.

Dengan mengatakan "harus bersikap realitis" tidak berarti kita harus puas dan mandeg, karena seperti saya katakan di muka, persyarikatan dapat pelan-pelan kehilangan relevansi bila tidak segera melakukan perubahan-perubahan kreatif. Kita harus terus membenah diri, bagaimana agar persyarikatan, samping meneruskan berbagai amal-usaha yang sudah terbukti tahan zaman, juga menyiapkan organisasi yang rapih dan kader sebanyak-banyaknya untuk mempercepat perubahan-perubahan inkrenetal dan reformatif.

Nah, bagaimana pembaharuan organisasional yang harus kita tempuh dan penyiapan sebanyak mungkin kader yang dapat menjadi *agents of change*, barangkali memerlukan pembahasan sendiri. Namun satu hal cukup jelas, untuk mencapai masyarakat utama yang kita idam-idamkan diperlukan tiga hal penting: pertama, konsep masyarakat utama itu sendiri harus dapat dibuat jelas dan koheren, kedua, dilakukan analisa sosial yang komprehensif tentang masyarakat di mana kita hidup; ketiga, mengkonfrontasikan konsep-konsep tersebut dengan realitas sosial yang ada.

Wallahu a'lam.

Penulis adalah wakil ketua PP Muhammadiyah